

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Predanamedia.

Aman Al Muhtar, *Kajian Hukum Pidana Militer Tentang Perbuatan Disersi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Melaksanakan Tugas Dinasnya*, 2020, diakses di <http://www.unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/862>. Pada tanggal 25 Januari 2023.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 73.

Anak Agung Bayu Perwita, 2006, *Mencari Format Komperhensif Pertahanan dan Keamanan Negara*, Jakarta: Propartia Institute.

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.

-----, 2001, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta.

Bambang Sunarto, 2020, *Pendekatan Dalam Penelitian*, Jakarta: Sipadu Utama.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.

Conni Rahakundini Bakrie, 2007, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Dini Dewi Heniarti, 2017 *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama.

Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Eddy O.S. Hiariej, 2001, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

-----, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hans Kelsen, 2006, *Pengantar Teori Hukum*, Jakarta: Nusa Media.
- Hasbullah, F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pranada Media Group.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 44
- M. Busyro Muqoddas, 2011, *Hegemoni Rezim Intelijen*, Yogyakarta: PUSHAM UII, cetakan pertama.
- Marpaung, 2005, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat diHukum*, (Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhamad Yamin dan Sebastian Matengkar, 2006, *Intelijen Indonesia Towards Profesional Intelligence*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P.A.F. Lamintang, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum Dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, (Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia.
- Roeslan Saleh 2006, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Press.
- , 2006, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum dalam Bagan*, Pontianak: Fakultas Hukum Untan Press.
- Scharavendijk, van H.J, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: J.B. Wolters, 2008), hlm. 87,
- Simons, dalam E.Y. Kenter dan B.R. Sianturi, *Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2004), hlm. 204.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo, 2010), hlm. 85.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung.

## **Jurnal**

Andirizal, “*Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004*”, (online), (<https://www.neliti.com/id/publications/43279/analisis-yuridis-tentang-kedudukan-tentaranasional-indonesia-tni-setelah-berlak>), diakses pada tanggal 25 januari 2023.

Erna Kurniawati, 2018, ‘*Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota Tni Di Aceh Authority Of The Military Court I-01 Banda Aceh In Adjudicating General Crime Committed By Tni Member In Aceh Provinsi Aceh*, 2.2. 2018.

Fitriani Andi Pancai, Harahap Sholahuddin, *Penegakan Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1 (1), 2018.

Fany Syafitri and M Arif Sahlepi, *Eksistensi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Penelitian Di Hukum Daerah Militer I/BB)*, Jurnal Pancabudi 2021.

Immanuel Tiku, ‘*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Di Lakukan Oleh Pejabat Tni*’, Lex Crimen, 9.2 (2020).

I Wayan Kusuma Purwanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, ‘*Akibat Hukum Bagi Prajurit TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Diputus In Absentia Dalam Praktek Pengadilan Militer Iii-14 Denpasar*’, Jurnal Konstruksi Hukum, 2.1 (2021).

Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kumara Puspita Yekti Kristoforus Laga Kleden, Kumara Puspita Yekti, and Kristoforus Laga Kleden, ‘*Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Tni Terhadap Tindak Pidana Istri Dan Anggota Keluarga*’ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4 No.1 (2021).

Liota P.H., *Boomerang Effect: The Convergen of National and Human Security, dalam security dialogue*, Vol 33 No. 4.

Rifki Yuditya Saputra and Sugandi Ishak, '*Penerapan Pasal 281 Kuhp Tentang Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Militer. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 127-K/Pm.Ii-09/Ad/- Viii/2017)*', *Jurnal Hukum Adigama*, 2.1 (2019).

Trilke Tulung Ristra Selly Suoth, Michael Mamentu, '*Kerjasama Indonesia-Rusia Dalam Bidang Militer Dalam Konteks Peningkatan Pertahanan Dan Keamanan*', *Jurnal Eksekutif*, 1.1 (2018), hlm. 229.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (LN 1981/Nomor 3209);

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI (LN 2004/ Nomor 4439);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer (LN 2014/ Nomor 5591)

Putusan Peradilan Militer III-2 Nomor 132 K/PM-III-12/AD/X/2020.